

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR RI**
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	: 2011-2012
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Sabtu, 23 Juni 2012
Waktu	: 14.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Monas 2 (Hotel Arya Duta Jakarta)
Acara	: Pembahasan Penyempurnaan Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2013
Ketua Rapat	: Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: 27 dari jumlah 50 Anggota Komisi II DPR RI
Hadir Mitra	: - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan beserta jajarannya - Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2012 dibuka pukul 14.30 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan beserta jajarannya dan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (ORI) beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan Pembahasan Penyempurnaan Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2013.
3. Sekretaris Jenderal ORI menyampaikan :
 - a. Terkait rencana anggaran TA 2013 berdasarkan Pagu Indikatif untuk Ombudsman RI dalam perhitungan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah sebesar Rp67.630.000.000,- yang alokasi anggarannya salah satunya untuk memenuhi kebutuhan Ombudsman RI dalam membentuk 15 Perwakilan Ombudsman RI dan rekrutmen Asisten Ombudsman di TA 2012. Adapun alokasi anggaran TA 2013 sebesar Rp67.630.000.000,- pada dasarnya belum mencukupi kebutuhan Ombudsman RI terutama terkait dengan telah terbentuknya 22 Perwakilan di 22 Provinsi pada tahun 2013.

- b. Mengharapkan Komisi II dapat mengusulkan tambahan belanja pegawai dan operasional sebesar Rp10.000.000.000,- untuk 10 Perwakilan kepada Menteri Keuangan RI, mengingat pada TA 2013 telah terbentuk seluruhnya 22 Kantor Perwakilan Ombudsman yang operasional.
4. Sekretaris BNPP menyampaikan :
- a. Pagu Indikatif BNPP TA.2013 sebesar Rp. 273.800.000.000,- yang terdiri dari Pagu Belanja Mengikat sebesar Rp 14.135.200.000,- dan Pagu Belanja Tidak Mengikat sebesar Rp 259.664.800.000,-.
 - b. Adapun pagu indikatif tersebut untuk melaksanakan 2 program, yaitu:
 - 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP untuk mengakomodasi kegiatan dilingkup Sekretariat dengan 2 kegiatan yakni:
 - a) Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama dan Hukum dengan anggaran Rp 105.000.000.000,-.
 - b) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Operasional Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp 33.800.000.000,-.
 - 2) Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan untuk mengakomodasi kegiatan di lingkup kedeputan dan pengalokasian anggaran ke daerah melalui mekanisme tugas pembantuan dengan 9 kegiatan yakni:
 - a) Pengelolaan Batas Wilayah Darat dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000.000,-
 - b) Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara dengan anggaran sebesar Rp 12.000.000.000,-
 - c) Pengelolaan Lintas Batas Negara dengan anggaran sebesar Rp 25.600.000.000,-
 - d) Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000.000,-
 - e) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dengan anggaran sebesar Rp 9.800.000.000,-
 - f) Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut dengan anggaran sebesar Rp 12.000.000.000,-
 - g) Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan dengan anggaran sebesar Rp 24.600.000.000,-
 - h) Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan dengan anggaran sebesar Rp 9.000.000.000,-
 - i) Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan dengan anggaran sebesar Rp 12.000.000.000,-

II. KESIMPULAN

1. Terhadap pagu indikatif Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 273.800.000.000,- Komisi II DPR RI menyetujui jumlah pagu yang diusulkan tersebut, dan menugaskan Badan Anggaran Komisi II DPR RI untuk menindaklanjutinya dalam pembahasan selanjutnya di Badan Anggaran DPR RI. Terkait dengan pengalokasian anggaran untuk masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan BNPP Tahun Anggaran 2013, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara lebih rinci dalam pembahasan selanjutnya.

2. Terhadap pagu indikatif Ombudsman RI Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 67.630.000.000- Komisi II DPR RI menyetujui jumlah pagu yang diusulkan tersebut, dan menugaskan Badan Anggaran Komisi II DPR RI untuk menindaklanjutinya dalam pembahasan selanjutnya di Badan Anggaran DPR RI. Terkait dengan pengalokasian anggaran untuk masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan ORI Tahun Anggaran 2013, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara lebih rinci dalam pembahasan selanjutnya.
3. Terhadap usulan tambahan Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang diajukan oleh Ombudsman RI terkait dengan kebutuhan anggaran untuk 10 perwakilan Ombudsman RI yang akan terbentuk pada akhir Tahun 2012, Komisi II DPR RI menyetujui usulan tersebut, dan menugaskan Badan Anggaran Komisi II DPR RI untuk menindaklanjutinya dalam pembahasan selanjutnya di DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 16.30 WIB.

KETUA RAPAT,

GANJAR PRANOWO
A-365